



## **KETERLIBATAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DAN SEKURITISASI ISU KEMANUSIAAN PENGUNGSI SURIAH DI TURKI TAHUN 2015**

**Nur Senja Hidayatul Mufidha<sup>1</sup>  
Rifqi Its'naini Yusuf<sup>2</sup>**

### **Abstrak:**

Konflik Suriah merupakan konflik yang terjadi akibat dampak Arab Spring yang menyita perhatian dunia dan membuat rakyatnya memutuskan untuk migrasi menuju negara tetangga seperti Turki, Lebanon, Jordania dan lainnya untuk mencari perlindungan dan rasa aman. Adapun Turki merupakan negara yang paling banyak didatangi pengungsi pada tahun 2015 mencapai 2,5 juta jiwa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data sekunder dan menggunakan teknik studi pustaka dengan ruang lingkup kajian Turki tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlibatan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan sekuritisasi isu kemanusiaan pengungsi Suriah di Turki pada Tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sebagai organisasi internasional dibawah PBB yang menangani pengungsi dunia masuk untuk menangani krisis yang terjadi di Turki dan memiliki keterlibatan dalam sekuritisasi isu kemanusiaan yang terjadi pada pengungsi Suriah di Turki tahun 2015. Keterlibatan UNHCR dalam upaya penanganan pengungsi Suriah di Turki meliputi penyelesaian isu pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.

**Kata Kunci:** *Sekuritisasi, Pengungsi, Suriah, Turki, UNHCR.*

### **Abstract:**

The Syrian conflict occurred due to the impact of the Arab Spring which captured the world's attention and made its people decide to migrate to neighboring countries such as Turkey, Lebanon, Jordan and others to seek protection and a sense of security. Turkey was the country with the most refugees in 2015 reaching

2.5 million people. This study uses a qualitative method with secondary data sources and uses a literature study technique with the scope of the Turkish study in

<sup>1</sup>*Mahasiswa Hubungan Internasional  
Universitas Peradaban (UP) Bumiayu.  
e-mail : [senjanur6@gmail.com](mailto:senjanur6@gmail.com)*

<sup>2</sup>*Dosen Hubungan Internasional  
Universitas Peradaban (UP) Bumiayu.  
e-mail : [rifqi.itsnaini@gmail.com](mailto:rifqi.itsnaini@gmail.com)*

2015. The purpose of this study was to determine the involvement of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the securitization of the humanitarian issue of Syrian refugees in Turkey in 2015. The results of this study indicate that the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) as an international organization under the United Nations that handles international refugees has entered to deal with the crisis that occurred in Turkey and has been involved in the securitization of humanitarian issues that occurred to Syrian refugees in Turkey in 2015. UNHCR in its efforts to handle Syrian refugees in Turkey includes resolving issues of education, health, and housing.

**Keywords:** *Securitization, Refugees, Syria, Turkey, UNHCR.*

## **Pendahuluan**

Arab Spring merupakan peristiwa politik yang terjadi di Timur Tengah (Arab) yang berkejolak mulai tahun 2011. Peristiwa ini berawal dari aksi bunuh diri seorang pemuda Tunisia bernama Mohammed Bouazizi lalu kemudian merambat ke negara-negara Arab lainnya seperti Mesir dan Suriah. The Arab Spring dilatarbelakangi oleh kondisi sosial politik dan ekonomi yang berlangsung di negara-negara timur tengah. Kejolak masa terjadi akibat banyaknya kasus kemanusiaan dan rezim yang otoriter atau anti-demokrasi. Sementara konflik yang terjadi di Suriah tidak dapat terlepas dari fenomena Arab Spring, akar konflik Suriah ini berawal dari ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Bashar Al- Assad. Rezim Assad dianggap sebagai pemerintahan otoriter oleh beberapa pihak, berlangsung di Suriah selama lebih dari 30 tahun (Ridho, 2020).

Akibat adanya peristiwa Arab Spring ini kemudian di Suriah muncul isu Human Security, yang mana isu ini merupakan isu sangat serius yang dihadapi banyak negara di dunia dan mendapatkan banyak perhatian karena keamanan bentuk representatif dari setiap negara dalam menjamin keberlangsungan bangsa dan kedaulatan wilayah. Ancaman terhadap keamanan individu menunjukkan ketidakmampuan negara dalam menjamin perlindungan bagi rakyatnya (Programme, 2013). Hal ini terjadi di negara-

negara kawasan Timur Tengah yang mengalami gejolak Arab Spring. Salah satu krisis kemanusiaan yang menyita perhatian dunia adalah krisis kemanusiaan Suriah. Krisis ini terbilang besar pada Maret 2011 yang dilihat dari rakyat menentang otoritas yang lama dari rezim Bashar Al-Assad selama lima dekade. Tuntutan mundur Presiden Bashar Al-Assad berujung perang saudara yang membuat 470.000 jiwa tewas. Kondisi tersebut membuat warga Suriah melakukan migrasi ke negara-negara Eropa untuk mencari perlindungan dan rasa aman. Konflik ini merupakan konflik terpanjang dibandingkan dengan negara – negara Arab lainnya yang terkena dampak Arab Spring (Guardian, 2016).

Jika dilihat secara geopolitik, arus migrasi Suriah lebih tertuju ke Eropa karena negara-negara Eropa dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Adapun Turki yang merupakan salah satu gerbang pertama menuju Eropa juga menjadi perhitungan imigran Suriah untuk mendapatkan status pengungsi. Pada Tahun 2015, Turki menerima 2,5 juta Pengungsi Suriah. Diikuti Lebanon, Jordania, Irak, Yunani, Macedonia, Hungaria (Beauchamp, 2015). Adapun masalah yang muncul di Turki akibat dari kedatangan pengungsi dari Suriah yaitu penolakan warga Turki, gesekan sosial dan politik yang berdampak pada meningkatnya resiko konflik di dalam negeri, dan beban finansial dimana beban finansial yang harus dikeluarkan Turki dalam menerima pengungsi Suriah mengalami peningkatan setiap tahunnya dan yang terakhir yaitu bertambahnya jumlah kepadatan penduduk. Masalah-masalah yang ditimbulkan dari akibat datangnya pengungsi Suriah menjadi suatu ancaman tersendiri bagi Turki. Hal ini kemudian menjadi perhatian besar tentang masalah pengungsi Suriah oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Turki.

Berdasarkan data UNHCR dalam dw.com, Turki merupakan negara terbesar yang menerima pengungsi Suriah dari tahun 2011-2015 sebesar

(42%). Disusul dengan Lebanon (27%), Jordania (15%), Eropa termasuk Jerman (10%), Irak (6%), dan Mesir (3%) (Fuchs, 2015) (Welle, 2015).

Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dari adanya pengungsi Suriah di Turki, maka UNHCR yang telah melakukan kerja sama dengan Turki terkait masalah para pencari suaka dan pengungsi sejak tahun 1960 masuk untuk menangani krisis yang sedang terjadi di Turki. UNHCR didirikan pada tahun 1950 oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memimpin dan mengoordinasikan aksi internasionalnya terhadap masalah pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak dan kesejahteraan para pengungsi, memastikan setiap individu dapat menggunakan haknya untuk mencari suaka dan menemukan perlindungan yang aman, dan bantuan kemanusiaan untuk melindungi pengungsi. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan resmi Komisaris Tinggi UNHCR Antonio Guterres bahwa arus migrasi Suriah menuju Eropa telah melampaui lebih dari empat juta jiwa dan arus ini merupakan arus terbesar di dunia. Para Pengungsi Suriah yang menuju Turki juga diperkirakan telah mencapai 4 juta jiwa. Maka dari itu, krisis pengungsi Suriah perlu didukung banyak negara agar tidak terjadi krisis kemanusiaan yang berlarut-larut. Bahkan, UNHCR tidak bisa membiarkan kondisi ini terpuruk sehingga UNHCR membutuhkan uluran tangan negara-negara lain untuk membuka mata dan hati dalam menampung mereka.

## **Kerangka Pemikiran**

### **A. Human Security**

Pada umumnya, human security identik dengan memprioritaskan keamanan setiap individu dari segi kesejahteraan, keselamatan, dan kualitas hidup mereka di suatu negara. Sekuritisasi pada awalnya merupakan sebuah gagasan yang diperkenalkan oleh Barry Buzan, Jaap De Wilde dan Ole Waever selama pertengahan tahun 1990 dalam bukunya di tahun 1998 yang berjudul *Security: A New Framework for Analysis* (Barry Buzan, 1998).

Menurut Buzan, keamanan dapat menjadi satu Langkah yang membawa tidakan politik dalam melampaui peraturan yang ada dan membingkainya menjadi sebuah isu. Di buku Buzan juga terdapat penjelasan bahwa studi keamanan tidak hanya tentang persoalan negara dan militer tapi juga yang termasuk kategori Human Security. Adapun kategori human security, yaitu kemiskinan, perpindahan penduduk kelaparan, penyakit, degradasi lingkungan dan pengucilan sosial. Aspek-aspek penting dalam human security, diantaranya keamanan ekonomi, politik, kesehatan, lingkungan, keamanan individu dan masyarakat serta keamanan pangan. Sebagian besar, negara-negara berkembang melihat gagasan mengenai human security sebagai kampanye nilai-nilai HAM dan demokrasi liberal barat. Selain itu, para penganut universalisme kemanusiaan dan HAM berpendapat bahwa masalah kemanusiaan adalah masalah universal dan pelanggaran perlindungan besar terhadap HAM dalam menciptakan keberlangsungan entitas negara di arena internasional (Churruca, 2017).

Keamanan manusia dapat dikatakan memiliki dua aspek utama. Pertama, keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan represi. Dan kedua, perlindungan dari gangguan mendadak dan menyakitkan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, di pekerjaan atau di masyarakat. Ancaman tersebut bisa ada di semua tingkat pendapatan dan pembangunan nasional.

Konsep Human security ini dipakai karena konflik besar yang terjadi di Suriah mengancam keberlangsungan hidup warganya sehingga mereka memilih untuk mengungsi ke Turki yang kemudian menjadikan mereka Refugee dengan segala kekurangannya. Kemudian karena UNHCR sudah melakukan Kerjasama dengan Turki terkait masalah para pencari suaka sejak tahun 1960, merasa perlu terlibat untuk melindungi pengungsi dan yang dilakukan oleh UNHCR terhadap pengungsi Suriah di Turki terkait dengan isu kemanusiaan yang sedang terjadi yaitu memberikan perlindungan dan

bantuan kemanusiaan seperti membangun tenda- tenda penampungan bagi para keluarga pengungsi Suriah, menyediakan dan mendistribusikan berbagai barang kebutuhan pokok dan sekunder untuk para pengungsi Suriah dan berupaya menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi Suriah (Patunru, 2014).

## **B. Teori Organisasi Internasional**

Selain Human Security penulis juga menggunakan teori organisasi internasional sebagai pendukung. Organisasi internasional didirikan dan dibentuk dengan tujuan agar saling bekerjasama dalam menyelesaikan masalah atau persoalan yang dihadapi oleh suatu negara. Menurut Clive Archer dalam bukunya yang berjudul *International Organizations* menjelaskan pengertian organisasi internasional merupakan sebuah struktur yang dibentuk oleh persetujuan dari anggotanya baik negara ataupun non-negara dengan tujuan dan kepentingan yang sama. Di dalam buku Clive Archer juga disebutkan bahwa organisasi internasional memiliki tiga peran yaitu sebagai instrumen, sebagai arena, dan sebagai aktor (Archer, 2001).

Kasus pengungsi Suriah di Turki tahun 2015 ini juga dapat dilihat dari prespektif islam melalui maqoshid syariah. Maqoshid syariah merupakan kajian ijthadiyah yaitu menampakan hukum yang tidak ada atau nash (dalil) dalam Alquran maupun hadist yang bertujuan untuk mencari tahu dasar landasan atau sebab mengapa hukum itu diturunkan. Konsep Maqoshid syariah dikembangkan sejak abad ke-12 oleh Abdul Hamid Al-Ghazali (wafat 1.111 M) melalui penjagaan atau perlindungan lima aspek fundamental manusia diantaranya yaitu melindungi iman, melindungi akal, melindungi jiwa/badan, melindungi keturunan dan melindungi harta (Fathoni, 2017).

Adapun lima aspek fundamental kehidupan manusia yang dikembangkan oleh Al- Ghazali masuk dalam kategori Dharuriyyat, kategori ini terdiri atas sesuatu yang mendasar dan esensial terjaganya kepentingan dunia dan akhirat. Dharuriyyat merupakan segala sesuatu yang bila tidak

tersedia akan mengakibatkan rusaknya kehidupan. Konflik Suriah yang menyebabkan kondisi negara menjadi tidak aman dan membuat warganya melakukan migrasi ke negara lain untuk mencari perlindungan merupakan persoalan yang urgent dalam ajaran islam karena menyangkut iman, mental health, pendidikan, dan harta dimana konflik yang terjadi mengakibatkan warga Suriah menjadi pengungsi di negara lain dan meninggalkan harta bendanya. Dalam ajarab islam, ketika terdapat seseorang di tempat baru dan tidak memiliki harta benda wajib difasilitasi. Masuknya UNHCR dalam upaya penanganan pengungsi juga mengambil peran sebagai fasilitator untuk membantu pengungsi atau wakil dari negara-negara muslim untuk membantu permasalahan pengungsi Suriah di Turki.

### **Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif. Menurut Lofland dan Lofland (Moelong, 2012 :157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata- kata dan Tindakan, selebihnya adalah data pendukung seperti dokumen dan lain- lain. Penelitian ini menggunakan satu sumber data yaitu sumber data sekunder.

Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan teknik library research atau studi pustaka (literature review), yaitu mengumpulkan data berupa informasi- informasi melalui buku, jurnal ilmiah elektronik, e-book, artikel ilmiah, dan berita online yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis kaji.

### **Hasil dan Pembahasan**

The Arab Spring berawal dari peristiwa pemuda Tunisia, Mohammed Bouazizi yanh melakukan protes terhadap sistem pemerintahan setempat di

bawah rezim otoriter Ben Ali. Mohammed Bouazizi memprotes pemerintah dengan melakukan aksi bakar diri yang kemudian menjadi perhatian seluruh negeri, bahkan dunia. Peristiwa itu berlangsung pada hari Jum'at, 17 Desember 2010. Pada hari itu pemuda Tunisia itu berangkat pagi hari dari rumahnya untuk melakukan aktivitas seperti biasanya yaitu berjualan sayur-sayuran di Sidi Bouzid, 190 Mil selatan Tunisia. Pada saat itu Bouazizi menjadi target Razia aparat karena dianggap berjualan menggunakan gerobak tanpa izin (Angrist, 2011). Karena merasa tindakan aparat tersebut salah maka Bouazizi melaporkannya ke kantor Gubernur akan tetapi tidak ditanggapi dengan serius, kemudian Bouazizi melakukan aksi bakar diri sebagai bentuk protes. Tewasnya bouazizi ini kemudian memunculkan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masa sebagai bentuk protes terhadap rezim yang dianggap anti-demokrasi.

Kemarahan publik bukan hanya setelah Bouazizi meninggal saja, selang sehari kemudian massa dalam jumlah yang cukup banyak turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa yang menyebabkan kerusuhan di kota tersebut, karena banyaknya masa yang melakukan aksi membuat petugas tidak mampu mengatasi kesuhan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa tersebut. Gerakan perlawanan terus terjadi hingga mengakibatkan kekerasan meningkat terus menerus, bahkan sampai mendekati ibu kota negara, Tunis. (Apriadi, 2011: 31).

Rezim otoriter Ben ali berakhir pada tanggal 14 Januari 2011 setelah presiden Ben Ali menyatakan mundur dari kekuasaannya sebagai Presiden Tunisia, keputusan Ben Ali untuk mundur secepatnya diakibatkan karena beberapa faktor, yang pertama yaitu gerakan masa di seluruh negeri semakin tidak terkendali oleh petugas. Yang kedua, dukungan dari Barat yang tidak kunjung datang pada saat krisis padahal pada waktu itu Ben Ali sangat membutuhkannya, kemudian Ben Ali meminta dukungan negara Perancis namun Perancis juga tidak bersedia memberinya suaka politik. Karena tidak



berhasil mendapatkan dukungan dari negara manapun kemudian sebagai cara terakhir Ben Ali akhirnya melarikan diri ke Arab Saudi (Angrist M. P., 2011).

Berakhirnya rezim otoriter Ben Ali di Tunisia oleh gerakan masa (People Power) menjadi perhatian media dari seluruh penjuru dunia. Kemudian hal itu menimbulkan efek domino terhadap negara-negara lain di wilayah Arab. Efek domino tersebut karena faktor yang menjadi penyebab rezim Ben Ali berakhir juga terdapat di negara-negara Arab lainnya. Bahkan kondisi di bidang ekonomi, sosial dan politiknya lebih parah dari apa yang dialami di Tunisia. Di negara-negara Arab sebagian masih menerapkan sistem otoriter atau anti-demokrasi. March Lynch menuliskan "if Arab regimes refused to change, they would be change from below" hal ini yang kemudian menjadi awal lahirnya perubahan di negara-negara Arab (Sahide, 2015).

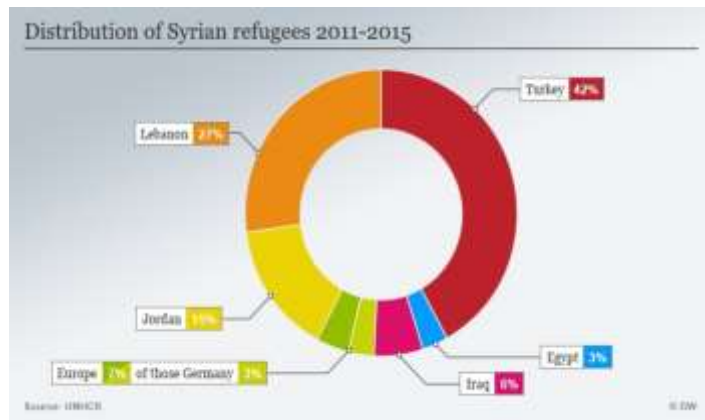
Konflik yang terjadi di Suriah berawal dari protes yang dilakukan karena terjadi penangkapan beberapa pelajar di kota Daraa. Pada saat itu tepatnya Maret 2011, 15 pelajar dengan usia 9-15 tahun menulis slogan anti pemerintah di tembok-tembok kota. Slogan itu bertuliskan "Rakyat menginginkan rezim turun" (Muti'ah, 2012). Anak-anak ini bisa saja terinspirasi dari pergolakan yang terjadi di Tunisia dan Mesir yang berhasil menggulingkan kedudukan presiden yang dinilai otoriter dan anti-demokrasi. Hal itu membuat munculnya gerakan protes yang menuntut untuk pembebasan anak-anak tersebut akan tetapi reaksi yang ditunjukkan tentara terhadap aksi protes itu sangat berlebihan, tentara itu menembaki para demonstran sehingga 4 orang meninggal. Setelah meninggalnya 4 demonstran itu protes kemudian semakin meluas dari Daraa sampai ke kota-kota pinggiran Latakia dan Banyas di Pantai Mediterania atau Laut Tengah. Protes dan aksi demonstrasi ini kemudian meluas menjadi perang sipil yang besar (Merdeka.com, 2013).

Ada beberapa sudut pandang mengenai sumber utama konflik Suriah. Yang pertama yaitu masalah ekonomi, politik, dan sosial yang dihadapi oleh Suriah. Permasalahan ini bisa dilihat dari tingginya angka pengangguran, inflasi, terbatasnya kebebasan dalam berpolitik dan aparat keamanan yang represif. Mata uang Pound Suriah sudah kehilangan nilai sebesar 78% sejak tahun 2011. Kemudian berdasarkan laporan Chatham House disebutkan bahwa tingkat inflasi terburuk terjadi pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2013 yaitu mencapai 120% (BBC, 2015). Terdapat pula tuntutan sebagian penduduk Suriah yang menginginkan reformasi dan penggantian rezim Bashar al Assad. Sejak tahun 1963 pemerintahan Suriah dikuasai oleh Partai Baath, kemudian selama 40 tahun Suriah di bawah pemerintahan Assad (Hafiz al Assad dan Bashar al Ashad). Hafiz al Assad berkuasa sejak tahun 1970 sampai dengan wafat pada tahun 2000, kemudian kekuasaan Hafiz menurun kepada anaknya yaitu Bashar al Assad yang berkuasa sejak kematian ayahnya pada tahun 2000 sampai dengan sekarang. Pada sektor pembangunan ekonomi dan sosial di negara tersebut juga masih belum terlihat memuaskan sehingga membuat Suriah masuk ke golongan negara berkembang yang berpendapatan menengah. Dalam situasi seperti ini sangat biasa bahkan wajar apabila muncul demonstrasi oleh masyarakat yang anti pemerintah dan menginginkan untuk pergantian rezim lama ke rezim baru yang diharapkan bisa memperbaiki sistem pemerintahan otoriter menjadi lebih demokratis. Kejenuhan terhadap kondisi politik yang terjadi ini dikarenakan oleh Assad yang terlalu lama menduduki kekuasaan sebagai Presiden (Kartaatmaja, 2014).

Kondisi negara yang tidak kondusif di Suriah membuat warga Suriah melakukan migrasi meninggalkan negaranya ke negara-negara Eropa untuk mencari perlindungan dan rasa aman. Menurut data yang diperoleh per 1 April 2014 ada sekitar 6,5 juta warga Suriah yang sudah meninggalkan rumah

mereka akibat konflik yang berkepanjangan dan tidak kunjung menemukan penyelesaian (Reid, 2014)

Gambar 1. Negara-negara yang menerima pengungsi Suriah tahun 2011-2015



**Sumber** : dw.com, 2015, Survey leaves no doubt: Syrians are fleeing Assad, diakses melalui <https://www.dw.com/en/survey-leaves-no-doubt-syrians-are-fleeing-assad/a-18775789>. (Diakses 19 Maret 2021).

Dampak konflik Suriah mencapai tahap yang mengkhawatirkan bukan hanya untuk Suriah tetapi juga bagi negara-negara tetangganya. Seperti pada data UNHCR dalam dw.com Turki merupakan negara terbesar yang menerima pengungsi Suriah dalam kurun waktu 2011-2015 sebesar 42% disusul dengan beberapa negara lainnya seperti Lebanon sebesar 27%, Jordania 15%, Eropa termasuk Jerman 10%, Irak 6% dan Mesir 3%. Sebanyak 21 kamp pengungsian telah didirikan di Wilayah Turki untuk menampung warga Suriah yang melarikan diri dari negaranya. Awalnya kondisi Kamp pengungsi relatif aman dan stabil, namun muncul permasalahan baru di wilayah kamp yang ditinggali oleh pengungsi yaitu tidak tersedianya air bersih dan buruknya sistem sanitasi (Fuchs, 2015).

Permasalahan-permasalahan yang muncul dan dirasakan oleh pengungsi menjadi perhatian khusus dan sebuah kewajiban bagi negara

penampung pengungsi maupun organisasi internasional yang menangani pengungsi untuk menyelesaikannya. Di satu sisi para pengungsi berupaya untuk menuntut hak mereka terhadap kehidupan yang layak meskipun di lingkungan kamp pengungsian, namun disisi lain negara penerima pengungsi juga mengalami kesulitan dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk menjamin kehidupan yang layak bagi para pengungsi. Karena untuk membangun Sarana dan Prasarana untuk pengungsi dibutuhkan biaya yang cukup banyak, sedangkan negara sudah memiliki kebutuhan-kebutuhan lainnya yang lebih mendesak untuk menjamin hidup dan kepentingan warga negaranya.

Seperti yang terdapat pada negara-negara lainnya pengungsi Suriah di Turki juga dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pengungsi yang berada di dalam kamp dan pengungsi yang berada di luar kamp. Berikut penjelasan mengenai kategori pengungsi diluar kamp dan di dalam kamp beserta isu permasalahan yang ada:

#### A. Isu Pengungsi di dalam Kamp Pengungsian

Pengungsi Suriah yang menempati kamp-kamp pengungsian cenderung dalam kondisi yang lebih baik daripada pengungsi yang berada di luar kamp. Terdapat berbagai isu yang muncul mengenai pengungsi yang berada di dalam kamp pengungsian. Meskipun keadaan atau fasilitas yang ada di dalam kamp pengungsian dapat dikatakan terbatas, namun ada jaminan kehidupan sosial yang diberikan oleh lembaga pemerintah Turki yang mengurus pengungsi yaitu AFAD dan bekerjasama dengan UNHCR (HUGO, 2014).

Berikut penjelasan mengenai isu-isu pengungsi Suriah yang terdapat di dalam kamp pengungsian Turki:

##### 1. Isu pendidikan

Sebagian pengungsi Suriah di Turki merupakan anak-anak yang masih harus bersekolah, maka dengan mereka pergi meninggalkan negaranya dengan otomatis membuat proses belajar mereka terhenti. Hingga Oktober 2015 terdapat sekitar 708.000 pengungsi Suriah yang berusia sekitar 5 sampai dengan 18 tahun di Turki. Terdapat sekitar 90% anak usia sekolah yang tinggal di 25 kamp yang dikelola oleh pemerintah Turki terdaftar di sekolah pada tahun 2014-2015, namun anak-anak yang terdapat di kamp pengungsian hanya mewakili 13% dari populasi usia sekolah pengungsi Suriah di Turki. Ada beberapa hal yang menjadi faktor terhambatnya proses pembelajaran para pengungsi seperti hambatan bahasa karena bahasa pengantar dalam pembelajaran menggunakan bahasa Turki, kesulitan dalam berintegrasi sosial dan kesulitan ekonomi (Makovsky, 2019).

## 2. Isu Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, para pengungsi yang bermukim di kamp dalam kota maupun yang berada di perbatasan mengalami sejumlah permasalahan kesehatan yang disebabkan oleh terbatasnya fasilitas tempat tinggal yang memadahi, buruknya sistem sanitasi, kebersihan di lingkungan kamp maupun pengaruh suhu di wilayah tersebut. Penyakit menular merupakan suatu ancaman kesehatan yang paling nyata bagi pengungsi dan bagi negara tuan rumah. Terlebih dengan adanya peningkatan jumlah pengungsi yang terjadi pada tahun 2015 menimbulkan beberapa dampak negatif pada kesehatan. Peningkatan jumlah pengungsi menambah beban pada layanan kesehatan baik dari segi sumber daya manusia (petugas medis) maupun logistik. Pada tahun 2015, lebih dari 1,5 juta pasien pengungsi Suriah dipindahkan dari shalter kamp ke rumah sakit umum. Menurut data yang terdapat pada kementerian kesehatan, 35.000 warga Suriah atau pengungsi Suriah melahirkan di Turki dan membutuhkan perhatian khusus pasca melahirkan. Kemudian untuk poliklinik yang berada di perbatasan Suriah

mengalokasikan 30-40% dari kapasitas yang mereka miliki untuk menampung pengungsi Suriah.

Di Turki, kasus leishmania yaitu penyakit yang diakibatkan oleh bakteri yang dibawa oleh lalat pasir dan campak merupakan hal yang sudah biasa terjadi dan dirasakan oleh para pengungsi Suriah sejak awal kedatangannya pada tahun 2012. Hepatitis A, TBC, infeksi saluran pernafasan, malaria dan cacar merupakan penyakit menular lainnya dengan jumlah penderita yang cukup tinggi.

Gambar 2. Data Penyakit Menular pada Pengungsi 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Diare	5.376	12.769	28.910	54.107	2.769
Hepatitis A	718	509	40	25	4
Infeksi saluran pernapasan	47.665	239.776	252.169	332.720	39.914
Leishmaniosis	-	-	152	28	-
Tuberkulosis	3	15	29	54	-

Berdasarkan data penyakit menular yang berasal dari kementerian Kesehatan Turki dapat diketahui bahwa pengungsi yang terkena diare paling banyak terjadi pada tahun 2015, hal itu sebanding dengan kenaikan jumlah pengungsinya yang juga banyak pada tahun tersebut. kemudian penyakit lainnya yang memiliki jumlah paling banyak yaitu infeksi saluran pernafasan yang juga terjadi pada tahun 2015. Untuk kasus penyakit hepatitis A paling banyak terjadi di tahun 2012 dengan jumlah 718 kasus (Department of History of Medicine and Ethics, 2018).

Selain kesehatan fisik terdapat juga permasalahan mengenai kesehatan mental atau Mental Health yang dialami oleh para pengungsi terutama anak-anak. Gangguan kesehatan mental ini diakibatkan oleh rasa

trauma karena melihat berbagai macam tindakan kekerasan yang terjadi selama konflik (HUGO, 2014).

Selain itu terdapat permasalahan lainnya seperti terbatasnya jumlah shalter/ tenda di kamp pengungsian sehingga membuat sebagian pengungsi ada yang tinggal di luar tenda dengan suhu yang tidak menentu membuat para pengungsi mudah terserang penyakit, kurangnya ketersediaan air bersih, terbatasnya akses informasi yang bisa didapatkan oleh pengungsi dari luar, terbatasnya ruang gerak pengungsi di dalam kamp karena pemerintah membatasi izin keluar-masuk untuk pengungsi yang sudah berada di dalam kamp pengungsian (HUGO, 2014).

Kondisi dengan keterbatasan di dalam kamp pengungsian membuat para pengungsi merasakan jenuh untuk tetap tinggal di dalam kamp sehingga banyak pengungsi yang mulai pergi meninggalkan kamp dan menuju ke pusat-pusat kota di Turki. Keluarnya para pengungsi ini merupakan wujud protes terhadap kebijakan di dalam kamp yang sangat membatasi pergerakan pengungsi dan sulit memberikan pengungsi izin untuk keluar (HUGO, 2014).

#### B. Isu Pengungsi di Luar Kamp Pengungsian

Keadaan kamp pengungsian yang cenderung penuh menyebabkan sebagian pengungsi Suriah banyak menempati daerah perbatasan sebagai tempat tinggal, selain menempati daerah perbatasan, terdapat pengungsi yang keluar kamp dan masuk ke wilayah perkotaan Turki seperti di Istanbul dan Ankara. Hal ini tetap dilakukan oleh sebagian pengungsi meskipun sebenarnya pemerintah berusaha melakukan upaya secara maksimal dalam menyediakan fasilitas yang memadai di kamp pengungsian. Namun, hal ini tidak dapat menghentikan perpindahan yang dilakukan oleh pengungsi Suriah. Dorongan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik bahkan pekerjaan menjadi salah satu penyebab pengungsi Suriah keluar dari kamp pengungsian menuju wilayah kota (HUGO, 2014).

Namun pada kenyataannya kondisi kehidupan pengungsi Suriah yang berada di wilayah perkotaan Turki semakin memburuk karena dianggap lebih sulit daripada kehidupan pengungsi yang menempati kamp-kamp pengungsian. Perumahan, pangan, layanan kesehatan, pendidikan menjadi lebih sulit karena tidak ada dukungan dari negara untuk pengungsi yang berada di wilayah perkotaan. Pengungsi Suriah tersebut harus membayar sendiri akomodasi kehidupan sehari-hari mereka. Untuk masalah kesehatan baik pengungsi yang berada di luar kamp ataupun di dalam kamp hampir sama baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental pengungsi (HUGO, 2014).

Berikut penjelasan tentang isu pengungsi yang berada di luar kamp pengungsian:

#### 1. Isu tempat tinggal

Bagi pengungsi yang berada di dalam kamp pengungsian, tempat tinggal bukanlah sebuah permasalahan yang dapat menghambat keberlangsungan hidup mereka karena pemerintah dan organisasi terkait yang menangani permasalahan pengungsi sudah menyiapkan tempat tinggal berupa shelter-shelter untuk ditinggali para pengungsi beserta fasilitas pendukung lainnya. Namun bagi pengungsi yang berada di luar kamp pengungsian, tempat tinggal merupakan sebuah masalah baru yang harus diselesaikan. Hal itu karena bagi pengungsi yang berada di luar kamp terlebih mereka yang berada di pusat-pusat kota atau permukiman penduduk lokal, untuk mendapatkan tempat tinggal mereka harus mengeluarkan biaya sendiri untuk sewa tempat tinggal atau bergabung dengan penduduk setempat (HUGO, 2014).

Pengeluaran biaya untuk sewa tempat tinggal tentu menambah beban bagi para pengungsi karena mereka yang menjadi pengungsi pada dasarnya sudah tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Bagi mereka yang tinggal di luar kamp pengungsian, untuk sewa tempat tinggal dan menutupi



kebutuhan jangka pendek lainnya umumnya mereka harus mengeluarkan sebanyak 10.000 lira Turki atau sekitar \$1.850 tergantung pada ukuran keluarga dan jenis apartemen yang mereka sewa (HUGO, 2014).

## 2. Isu pendidikan

Pendidikan merupakan permasalahan yang dialami oleh pengungsi baik yang di dalam kamp pengungsian maupun di luar kamp pengungsian. Pengungsi Suriah yang tiba tahun 2015, sepertiga diantaranya diperkirakan buta huruf dan 13% lainnya tidak buta huruf karena belajar otodidak. Tingkat pendaftaran pendidikan pengungsi yang berada di luar kamp pada tahun 2014-2015 lebih rendah jika dibandingkan dengan yang berada di dalam kamp pengungsian, hanya sekitar 25% dari jumlah pengungsi usia sekolah. Perihal yang menjadi alasan pengungsi Suriah di Turki yang berada di luar kamp pengungsian tidak dapat menikmati jaminan pendidikan gratis di Turki adalah kesulitan ekonomi sehingga mendorong anak-anak dengan usia sekolah memasuki dunia kerja untuk membantu perekonomian keluarga atau untuk menghidupi dirinya sendiri, perbedaan bahasa yang digunakan pada lembaga pendidikan yaitu menggunakan bahasa Turki dan dianggap terlalu sulit dimengerti oleh pengungsi Suriah, tidak adanya izin tinggal sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran lembaga pendidikan dan ketakutan akan adanya ketegangan dan diskriminasi yang diterima oleh anak-anak pengungsi Suriah jika bergabung dengan warga Turki asli (Kartaatmaja, 2014).

## 3. Isu Xenophobia

Kedatangan pengungsi dari Suriah di Turki membuat sebagian pengungsi kemudian menempati shalter di kamp pengungsian yang sudah disediakan oleh pemerintah Turki dan organisasi terkait yang mengatasi permasalahan pengungsi sebagai tempat tinggal. Sebagian lainnya memilih untuk tinggal di luar kamp pengungsian dan menempati rumah sewa di kota karena kondisi di dalam kamp yang penuh sesak dan terbatasnya kebebasan mobilitas pengungsi. Jumlah pengungsi Suriah yang datang ke kota semakin

bertambah dan menyebar ke seluruh kota-kota besar di Turki kemudian memunculkan permasalahan Xenophobia, yaitu rasa takut yang berlebihan terhadap kedatangan orang asing atau rasa takut terhadap keberadaan seseorang dengan latarbelakang yang berbeda yang apabila dibiarkan akan berlarut-larut dan memunculkan rasa benci bahkan permusuhan. Ada sebagian kelompok warga asli Turki yang menganggap bahwa pengungsi yang datang dari Suriah ini akan mengancam keberlangsungan hidup penduduk lokal, menuduh bahwa pengungsi Suriah ini mengambil lahan pekerjaan yang seharusnya menjadi milik penduduk lokal, beranggapan bahwa tingkat kejahatan di Turki meningkat semenjak kedatangan pengungsi dari Suriah. Banyak warga Turki, terutama warga Turki golongan ekonomi lemah menganggap bahwa pemerintah lebih memperhatikan kehidupan pengungsi yang datang dari Suriah daripada kehidupan penduduk negaranya sendiri, mencuri lapangan pekerjaan, pencuri, penjahat dan berbagai pelabelan negatif lainnya. Sentimen anti Suriah ini terus bertambah dan menyebar di setiap kota di Turki seperti Gaziantep, di Gaziantep terdapat lebih dari 200.000 pengungsi Suriah. Ketegangan yang terjadi di Gaziantep mencapai titik tertinggi setelah kasus kematian seorang pengungsi Suriah yang menyewa rumah di tangan tuan tanah Turki, penduduk lokal menyerang pengungsi Suriah yang mereka temui di jalan, di taman bahkan sampai meneriakkan slogan anti-Suriah. Perlakuan diskriminasi dan kekerasan ini bukan hanya terjadi di Gaziantep saja, akan tetapi menyebar sampai ke kota-kota perbatasan Sanliurfa.

Konflik Suriah yang menjadikan warganya melakukan migrasi ke negara lain salah satunya yaitu Turki membuat mereka (pengungsi) berada pada level dharuriyyat. Dharuriyyat merupakan segala sesuatu yang bila tidak tersedia akan mengakibatkan rusaknya kehidupan dimana mereka hanya memiliki dua pilihan yaitu selamat atau mati.

Keadaan darurat tersebut membuat setiap orang yang memiliki rasa kemanusiaan untuk bertidak memberikan perlindungan kepada para pengungsi Suriah yang melebihi batas jangkauan negara bangsa maupun pilihan politik, yaitu atas nama umat manusia. Dalam kasus pengungsi Suriah di Turki, perlindungan terhadap pengungsi diberikan oleh pemerintah Turki dan organisasi internasional dibawah naungan PBB yang bertanggungjawab atas permasalahan pengungsi dunia yaitu UNHCR. Oleh sebab itu sekritisasi isu kemanusiaan terhadap pengungsi Suriah merupakan upaya memberikan perlindungan guna pemenuhan kebutuhan dharuriyyat para pengungsi dalam rangka memberikan keamanan pada hak-hak dasar manusia.

Dalam perspektif islam perlindungan terhadap pengungsi yang dilakukan oleh UNHCR, pemerintah Turki maupun NGO lokal lainnya ini merupakan bentuk perlindungan terhadap lima aspek fundamental manusia dalam konsep maqoshid syariah yang mencakup melindungi keimanan seseorang, melindungi keamanan akal karena kodisi konflik di Suriah sudah pasti berakibat pada kesehatan mental pengungsi, melindungi keamanan jiwa/badan, melindungi keturunan dan melindungi keamanan harta benda karena ketika mereka menjadi pengungsi di tempat baru sudah pasti tidak memiliki harta apapun mereka meninggalkan harta benda di negara asal.

Pemerintah Turki maupun Organisasi Internasional yang bergerak untuk mengatasi permasalahan pengungsi dalam hal ini adalah UNHCR melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi maupun menyelesaikan permasalahan isu kemanusiaan yang dialami oleh pengungsi Suriah di Turki. UNHCR sebagai organisasi internasional untuk urusan pengungsi pun tetap membutuhkan bantuan dari organisasi lainnya baik internasional maupun organisasi lokal dalam melakukan upaya penyelesaian pengungsi Suriah di Turki.

Dalam isu pengungsi Suriah di Turki, UNHCR bekerjasama dengan NGO setempat dalam menjalankan upaya penyelesaian permasalahan yang

ada. Dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi Suriah di Turki, UNHCR bekerjasama dengan beberapa organisasi internasional maupun regional dimana organisasi tersebut juga berperan aktif dalam pelaksanaan pemberian bantuan. Organisasi-organisasi internasional tersebut ada yang bernaung dibawah naungan PBB seperti United Nations International Emergency Children Fund (UNICEF) dan World Health Organization (WHO). Organisasi lokal yang bekerjasama dengan UNHCR maupun pemerintah Turki yaitu Insan Hak ve Hürriyetleri ve Insani Yardim Vakfi (IHH), Halenski Citizen Assembly-Turkey berkerjasama dalam memberikan bantuan pakaian, makanan, pelayanan kesehatan dan tempat tinggal, Association of Solidarity with Asylum Seekers and Migrant (ASAM), Anadolu Kültür, Human Resources Development Foundation (HRDF), Association for Human Rights and Solidarity for the Oppressed (MazlumDer) yang bekerjasama untuk proses adaptasi pengungsi Suriah dengan lingkungan baru dengan pelatihan bahasa Turki dan program dukungan psiko-sosial (Comission, 2016).

Setelah pengungsi Suriah masuk ke wilayah Turki maka mereka kemudian akan ditentukan statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR, setelah itu UNHCR akan menentukan tindakan perlindungan dan bantuan yang diperlukan untuk mencari penyelesaian yang baik bagi mereka. Pengungsi tersebut nantinya akan ditempatkan di kamp-kamp area perbatasan dibantu oleh Badan Bencana dan Management Darurat Turki (AFAD). Penentuan status pengungsi yang jelas sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 maupun dalam Statuta UNHCR akan mempermudah UNHCR dalam menyalurkan bantuan agar tepat sasaran dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat global dalam hal ini adalah PBB (Sari, 2018).

Dalam permasalahan kemanusiaan, UNHCR melihat bahwa permasalahan kemanusiaan yang terjadi kepada pengungsi Suriah ini

semakin Kompleks, sehingga UNHCR sebagai organisasi internasional berinisiasi untuk membawa permasalahan pengungsi di level internasional melalui Konferensi Donor. Konferensi Donor ini dilaksanakan di Kuwait pada tahun 2013 (Sari, 2018)

Untuk isu kebutuhan pokok bagi para pengungsi, tidak terkecuali yang ada di Turki, UNHCR melakukan kerjasama dengan Organisasi Internasional lain dan NGO setempat untuk mengatasi ketersediaan fasilitas di setiap kamp pengungsian seperti tenda, kebutuhan makanan dan melakukan pengembangan pembentukan komunitas yang turut menjadi faktor pendukung organisasi dalam penyaluran bantuan sandang, pangan dan papan para pengungsi. Pada tahun 2015 UNHCR, AFAD dan pemerintah Turki telah membangun 25 Kamp pengungsian di 10 wilayah Turki 16 diantaranya adalah kota kontainer dan 9 lainnya adalah kota tenda dengan total kapasitas 330.000 pengungsi. Pemerintah Turki juga membangun sekitar 272.000 perumahan yang digunakan untuk menampung pengungsi. kemudian UNHCR membentuk sistem aplikasi seluler ataupun online yang dinamakan Service Advisor yang memiliki tujuan untuk memudahkan pengungsi dalam mengakses informasi termasuk akses informasi bantuan di negara-negara sekitar (Rahsti, 2017).

Gambar 3. Kondisi kamp pengungsian di Kilis, Turki.



Sumber: UNHCR

Sebagian pengungsi Suriah di Turki merupakan golongan anak-anak dengan usia sekolah, namun karena adanya konflik yang membuat situasi tidak mendukung untuk terus melakukan pembelajaran maka proses pembelajaran itu terhenti. Sedangkan pendidikan merupakan aspek yang sangat penting yang berkaitan dengan masa depan anak-anak. Untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang dialami oleh pengungsi Suriah di Turki, UNHCR bekerjasama dengan Syrian Education Commission dan Turkish Ministry of Education memberikan sistem pendidikan dengan menggunakan sistem kurikulum Libya yang difokuskan bagi pelajar kelas 9-12 (Rahsti, 2017).

Beberapa langkah positif yang diambil pemerintah Turki untuk mengatasi permasalahan pendidikan yaitu menghilangkan hambatan hukum terhadap akses pengungsi Suriah yang ingin melanjutkan pendidikan formal mereka. Pada periode 2014-2015 pemerintah mencabut pembatasan yang berisi ketentuan pengungsi Suriah untuk menunjukkan izin tinggal Turki apabila akan melakukan pendaftaran di sekolah umum. Pemerintah Turki bersama dengan UNHCR dan UNICEF saling bekerjasama dalam menyebarkan informasi prosedur dan persyaratan untuk pendaftaran sekolah umum, membuat program bahasa Turki di sekolah umum untuk mempermudah pemahaman bagi pelajar yang berasal dari Suriah, memastikan dan mengontrol semua sekolah umum untuk menjamin akses anak-anak Suriah mendapatkan pendidikan dan memastikan ketersediaan akses kerja bagi pengungsi Suriah yang kurang mampu dan memberikan perlindungan tenaga kerja untuk meminimalisir bertambahnya pekerja usia anak di antara keluarga pengungsi Suriah. (Brown, 2015).

Untuk penanganan isu kesehatan pengungsi, UNHCR bersama dengan UNICEF membentuk dua program utama yaitu Water, Sanitation, and Higiene (WaSH) untuk memastikan kebersihan pemukiman dari adanya ancaman potensi penyakit. Kemudian program penanganan psikologis dalam hal ini

UNHCR bekerjasama dengan WHO yang mengacu terhadap mhGAP Humanitarian Intervention Guide. Selain itu juga UNHCR dan sejumlah instalasi kesehatan lokal berhasil membantu pengecekan kesehatan pengungsi maupun pengobatan untuk pengungsi terutama yang berada di daerah perbatasan Turki-Suriah (Rahsti, 2017).

Selain itu, untuk mengurangi beban dalam penyelesaian permasalahan kesehatan di kalangan pengungsi Suriah, UNHCR dan pemerintah Turki bekerjasama untuk mendirikan pusat kesehatan pengungsi. Pusat kesehatan pengungsi ini berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat dalam menyiapkan layanan kesehatan pengungsi Suriah. Pada periode 2015 terdapat 50 pusat kesehatan pengungsi di 13 kota di Turki. Di pusat kesehatan pengungsi, selain tenaga kesehatan/ medis juga terdapat pekerja sosial, ahli fisiologi dan juga penerjemah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan khusus pengungsi Suriah (Department of History of Medicine and Ethics, 2018).

Sesuai dengan peran UNHCR dalam melaksanakan tugasnya memberikan tiga pilihan yang diberikan kepada pengungsi yaitu repatriation (mengembalikan para pengungsi ke negara asalnya, Suriah), local integration (menampung para pengungsi di Turki), resettlement (memindahkan pengungsi ke negara lain). Upaya repatriation yang dilakukan oleh UNHCR mengalami hambatan karena faktor situasi Suriah yang masih dalam keadaan konflik dan belum kondusif dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan pengungsi setelah dikembalikan ke negara asalnya. Kemudian resettlement juga mengalami hambatan karena untuk memindahkan pengungsi ke negara lain butuh proses yang panjang dan tidak mudah, hal itu ditakutkan akan semakin mempersulit keadaan pengungsi tersebut (Sari, 2018).

## **Kesimpulan**

Arab Spring merupakan peristiwa politik yang terjadi di Timur Tengah (Arab) yang berkejolak mulai tahun 2011. Peristiwa ini berawal dari aksi bunuh diri seorang pemuda Tunisia bernama Mohammed Bouazizi lalu kemudian merambat ke negara-negara Arab lainnya seperti Mesir dan Suriah. The Arab Spring dilatarbelakangi oleh kondisi sosial politik dan ekonomi yang berlangsung di negara-negara timur tengah. Kejolak masa terjadi akibat banyaknya kasus kemanusiaan dan rezim yang otoriter atau anti-demokrasi. Sementara konflik yang terjadi di Suriah tidak dapat terlepas dari fenomena Arab Spring, akar konflik Suriah ini berawal dari ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Bashar Al-Assad. Rezim Assad dianggap sebagai pemerintahan otoriter oleh beberapa pihak, berlangsung di Suriah selama lebih dari 30 tahun. Konflik Suriah yang terus berkejolak membuat warganya memilih untuk melakukan migrasi ke negara-negara lain seperti Jordania, Libya, Turki. Turki merupakan negara penerima pengungsi paling banyak pada tahun 2015 yaitu sekitar 2,6 juta jiwa. Banyaknya jumlah pengungsi yang masuk ke negara Turki menimbulkan permasalahan baru yang harus diselesaikan. Maka UNHCR dan NGO lokal lain serta pemerintah Turki bersama-sama untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pengungsi. Keterlibatan UNHCR dalam upaya penanganan pengungsi Suriah di Turki meliputi penyelesaian isu pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan.[.] .

## **Referensi**

### **Sumber Buku**

- Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M. (2012 :157). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung Jawa Barat: ROSDA.
- Apriadi, T. (2011). *Revolusi Timur Tengah, Kejatuhan para penguasa Otoriter di negara-negara Timur Tengah*. Yogyakarta: Narasi.



**Sumber Dokumen Resmi:**

United Nations Development Programme. 2013. Human Development Report: Human Security a Thematic Guidance Note for Regional and National Human Development Reports Teams. diakses melalui <http://hdr.undp.org/en/content/human-security-guidance-note> pada 20 Februari 2021.

**Sumber Berita:**

Beauchamp, Zack. 2015. The Syrian refugee crisis, explained in one map, diakses melalui <https://www.vox.com/2015/9/27/9394959/syria-refugee-map> pada 20 Februari 2021.

The Guardian, 2016, Life expectancy in Syria fell by six years at start of civil war, diakses melalui <https://www.theguardian.com/world/2016/aug/24/life-expectancy-insyria-fell-by-six-years-at-start-of-civil-war> pada 20 Maret 2021.

the UN Refugee Agency. 2015. Total Number of Syrian Refugees Exceeds Four Million for First Time, diakses melalui <https://www.unhcr.org/news/press/2015/7/559d67d46/unhcr-total-number-syrian-refugees-exceeds-four-million-first-time.html> pada 20 februari 2021.

\_\_\_\_\_.2021. UNHCR in Turkey, diakses melalui <https://www.unhcr.org/tr/en/unhcr-in-turkey> pada 20 Maret 2021.

Fuchs, R. (2015). Survey Leaves No Doubt : Syrian Are Fleeing Assad. Germany: DW.com.

Kompas. (2011). Revolusi Tunisia Juga Menjalar Ke Mesir. Kompas.

**Sumber Jurnal Elektronik:**

Patunru, A. U. (2014). Peranan United Nation High Commissioner For Refugee (UNHCR) Terhadap Pengungsi Korban Perang Saudara di Suriah. Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar, 55.

Muhammad Ridho, Y. M. (2020). Analisis Konflik Arab Spring di Suriah. JUPIIS: Jurnal Pendidikan ilmu-ilmu Sosial, 112.

- dw.com .2015. Survey leaves no doubt: Syrians are fleeing Assad, diakses melalui <https://www.dw.com/en/survey-leaves-no-doubt-syrians-are-fleeing-assad/a-18775789> pada 21 Februari 2021.
- Fathoni, M. (2017). Relevansi Maqoshid Syariah Sebagai Pendekatan Baru Diplomasi Islam Dalam Penyelesaian Konflik Minoritas: Teori dan Praktik. *INSIGNA Vol 4, No.1, 39.*
- Bautista, D. (n.d.). Struktur badan PBB urusan pengungsi (UNHCR) beserta mandatnya. 168.
- Sari, R. S. (2016). Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Suriah Di Turki Tahun 2013-2016. *e-journal ilmu hubungan internasional fisp unmul, 826-828.*
- Sari, R. S. (2018). Peran United Nation High Commissioner For Refugee (UNHCR) dalam menangani pengungsi Suriah di Turki Tahun 2013-2016. *E Journal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 6, 832.*
- UNHCR. (2015). Ministerial Pledging Conference on Somali Refugees.
- Angrist, M. P. (2011). Morning in Tunisia. The Frustrations of The Arab Boil Over. *The New Arab Revolt, 80.*
- Britannica, T. E. (2011, February). syrian civil war. The Syrian Refugees in Lebanon. *The American University in Cairo, 29.*
- Kartaatmaja, A. M. (2014). Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya. *Politica Vol.5 No.1, 5.*
- Sahide, A. (2015). The Arab Spring: Membaca Kronologis dan Faktor Penyebabnya. *Jurnal Hubungan Internasional Vol.4 No.2, 123.*
- 3RP. (2016). Regional Refugee and Resilience Plan 2015-2016 Turkey. 3RP Regional Refugee and Resilience Plan 2015-2016 Turkey in Respons to The Syrian Crisis, Hal.3.
- Comission, E. (2016). Humanitarian Aid and Civil Protection. Turkey Refugee Crisis.
- Department of History of Medicine and Ethics, T. U. (2018). Syrian Refugees, Health and Migrations Legislations in Turkey. HSS Public Access.
- HUGO. (2014). Syrian in Turkey : Social Acceptance and Integration Research. Hacettepe University Migration and Politics Research Centre (HUGO).